BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Dalam decade 1945-1947, kerena keadaan politik yang kurang baik jawatan kehutanan hanya dapat melaksanakan tugasnya di Sumatra dan Jawa saja.
Di Jawa Barat sebagai pimpinan pada saat itu adalah R.O Nurhadi yang diangkat sebagai inspektur kehutanan bagian I Bandung, dengan surat ketetapan departemen kemakmuran tanggal 24 Oktober 1945 No 735/A/Keh. Pada masa revolusi itu tugas pokok jawatan kehutanan adalah turut mempertahankan defacto RI dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama pihak militer dan intansi jawatan sipil lainnya.

Pada tahun 1974 di Jawa Barat terbentuk negara Pasundan dan intansi kehutanan berubah menjadi *De Dienst Van Boswezen Van Negara Pasundan,* yang dipimpin oleh Ir. C.Y Moel sampai dengan 1949. Dan pada tahun itu juga intansi kehutanan muiai disusun secara federatif, dan di bentuklah suatu badan baru yang disebut Planologi Kehutanan yang terpisah pengelolaannya, yang dipimpin oleh P.H Adang Prawiradireja sampai tahun 1952.
Pada tahun 1952 keluar keputusan jawatan tanggal 17 November 1951 No. 4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade Planologi Indonesia, dimana Planologi Kehutanan Jawa Barat ditetapkan sebagai Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R.Oesman Nandika.
Peraturan pemerintah No.20/1952 menetapkan kehutanan di Jawa dan Madura dibagi-bagi menjadi beberapa inpeksi kehutanan. Bertindak sebagai inspektur bagian I pada waktu itu adalah R.Koesnowarso. Tetapi tidak lama kemudian diganti oleh M.Saroso.

Pada tahun 1953 kepala jawatan kehutanan dengan surat keputusan tanggal 1 Oktober 1953 No.17777/KD/I/5 mengukuhkan susunan organisasi setiap inspeksi, sehingga mempertegas garis komando dan koordinasi.

Oleh karena pada tahun 1954 M.Saroso meniggal dunia, R.Oesman Nadika yang semula menjabat kepala Brigade I Planologi Jawa Barat dialih tugaskan menjadi Inspektur Jawatan Kehutanan bagian I Jawa Barat, dan Kepala Brigade I Planologi Kehutanan dijabat oleh Adang Durachman.

Pada tahun 1957 keluar peraturan pemerintah No.64/1057 yang menetapkan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat pada daerah-daerah Swatantra tingkat I. Maka berubah status inspeksi kehutanan bagian I Jawa Barat menjadi Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat yang selaku kepala dinas pertama adalah R. Oesman Nandika sampai tahun 1964, setelah itu digantikan oleh Adang Durachman sampai tahun 1971.

Pada tahun 1971 sampai dengan bulan Mei 1974 Dinas Kehutanan Tingkat I Jawa Barat dipimpin oleh Ir. Sulaeman Partadisastra yang selanjutnya digantikan oleh Rd. Usman Mu'min BSc F sebagai pejabat kepala dinas difinitif sampai akhir Februari 1978.

Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat selama tahun 1954 sampai dengan tahun 1971 mengalami 2 kali pergantian pimpinan, yaitu Ir. Yunus Kartasubrata dan Andi Abdul Ripai yang selanjutnya digantikan oleh M. Simbolon pada tahun 1974. Pada awal tahun 1978 Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menjadi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dengan kepala unit adalah Ir. Suherman Buhron.

Pada waktu itu pula , Brogade Planologi Kehutanan Jawa Barat dilebur ke dalam Perum Perhutani menjadi biro perencanaan Unit III Perum Perhutani Jawa Barat.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Adapun tempat dari pengerjaan kerja praktek ini adalah pada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta No. 628 Bandung.

Dan kedudukan dari Perum Perhutani ini berada di bawah naungan pemerintahan daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Perum Perhutani didirikan pada tanggal 10 Januari 1978, berdasarkan peraturan pemerintah No.2 tahun 1978 dengan menarik kembali urusan bidang kehutanan pada pemerintahan daerah tingkat I.

Dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III, segala hak dan kewajiban kekayaan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih pada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 23 Agustus 1986 peraturan pengelolaan dirubah kembali dengan peraturan pemerintah No.36 tahun 1986.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Tugas pokok dan tata kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat berdasarka surat keputusan direksi perusahaan umum Kehutanan Negara No.313/KPPS/BIR/1989, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dipimpin oleh seorang kepala unit dibantu oleh seorang wakil kepala unit dan 9 kepala biro yang masing-masing mengepalai :

1. Biro Umum, yang membawahi seksi umum dan seksi personalia.
2. Biro Perencanaan Hutan, yang membawahi seksi perencanaan umum, seksi perencanaan prasarana hutan, seksi pengukuran dan perpetaan serta Seksi Perencanaan Hutan daerah (SPHD) I Bogor, SPHD II Bandung, SPHD III Cirebon.
3. Biro Produksi, yang membawahi seksi ekploitasi kayu dan seksi eksploitasi non kayu serta seksi usaha wisata.
4. Biro Pembinaan Hutan, yang membawahi seksi reboisasi dan rehabilitasi lahan serta seksi pemeliharaan dan pembinaan lingkungan.
5. Biro Keuangan, yang membawahi seksi anggaran dan pembelanjaan seksi akuntansi serta seksi data dan informasi.
6. Biro Hukamas, yang membawahi seksi hokum dan agraria, seksi keamanan dan seksi humas.
7. Biro Industri, yang membawahi seksi industri kayu dan seksi industri non kayu.

8. Biro Pemasaran, yang membawahi seksi pengujian, seksi analisa pasar dan seksi penjualan.
9. Biro Teknik dan Perlengkapan, yang membawahi seksi bangunan teknik, seksi instalasi dan seksi perlengkapan.

Untuk selanjutnya pembagian wilayah kerja unit ke dalam Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di tetapkan oleh menteri atas usul direksi.

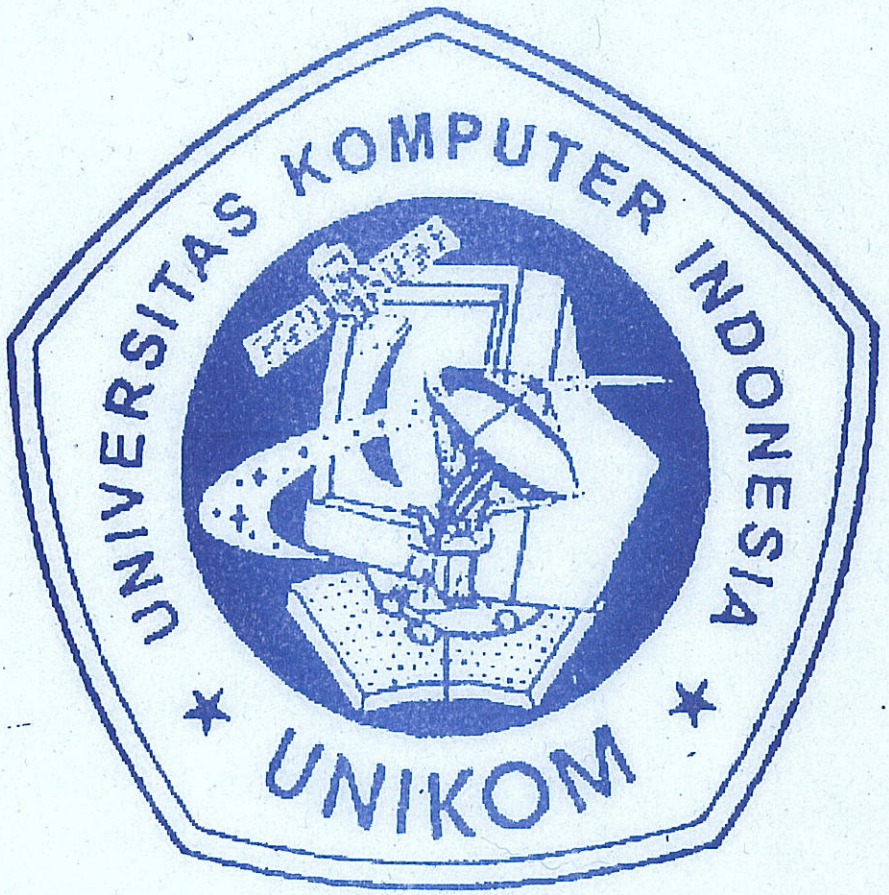
2.5 Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Praktek

Dalam kerja praktek ini penulis di tempatkan pada bagian Biro Keuangan. Adapun tugas secara keseluruhan biro keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro keuangan antara lain menyusun konsep pedoman kerja, JUKLAK dan JUKNIS bidang keuangan, akuntansi dan bidang data dengan pedoman kerja JUKLAK dan JUKNIS yang disusun direksi.
2. Menyusun rencana operasional dan rencana anggaran belanja biro keuangan.
3. Bertindak sebagai bendahara umum keuangan unit.

2.6 Struktur Organisasi

Untuk struktur organisasi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dapat dilihat pada bagian lampiran.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM